

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

The Implementation Of Additional Income Policy In Regional Secretariat Polewali Mandar

Nurhayati¹, Husain Hamka², Juharni²

¹Mahasiswa, Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

²Program Studi Magister Administrasi Publik, Program Pascasarjana, Universitas Bosowa

E-mail: juharni@universitasbosowa.ac.id

Diterima : 12 Pebruari 2019
Dipublikasikan : 08 April 2019

ABSTRAK

Otonomi daerah memberi peluang kepada daerah untuk menyelenggarakan acara dan layanan pemerintah kepada masyarakat secara mandiri sesuai dengan mandat undang-undang. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan layanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menerapkan Penghasilan Tambahan Pengusaha untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan yang diharapkan berdampak pada peningkatan kinerja karyawan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana implementasi Penghasilan Tambahan Pengusaha, juga faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan kebijakan untuk pendapatan tambahan. Penelitian ini dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat dengan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Sedangkan teknik analisis data, dilakukan dengan analisis sebelum masuk ke bidang penelitian, reduksi data, penyajian data, dan membuat kesimpulan atau verifikasi penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Penghasilan Tambahan bagi pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kebijakan Penghasilan Tambahan untuk Pemerintah Karyawan di Sekretariat Daerah Polewali Mandar. Kebijakan ini telah meningkatkan kinerja, kompetensi, dan kesejahteraan pegawai pemerintah. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan kebijakan pendapatan tambahan bagi karyawan Ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini, yaitu Sumber Daya (anggaran), sikap dan struktur birokrasi. Faktor penghambat belum dapat ditangani dengan baik oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, termasuk dalam hal sumber daya (fasilitas) dan sumber daya (Sumber Daya Manusia)

Kata Kunci : implementasi, pendapatan tambahan, kinerja

ABSTRACT

Regional autonomy gives a chance to the region to organize government events and service to society independently according to the statutory mandate. In order to improve effectiveness and service to the society, Polewali Mandar Regency Governments applied Employers Additional Income to improve the welfare of employees which expected to have an impact on increasing the performance of employees. This research aims to find out and describe how is the implementation of Employers Additional Income, also factors which affected the implementation of policies for additional income. The research was carried out in Regional Secretariat Polewali Mandar Regency West Sulawesi Province with a descriptive qualitative research methods in inductive approaches. The data and information collecting techniques implemented by observation, interviews, documentation and triangulation. While the data analysis techniques, carried out with the analysis before go to the research field, data reduction, data presentation, and make a conclusion or verification research. Based on the results of research and data processing, it can be concluded that the implementation of Additional Income policy for the employees in Regional Secretariat Polewali Mandar Regency had been in accordance to the Polewali Mandar Regent Regulation Number 45 Year 2016 about Additional Income Policy for Government Employees in Regional Secretariat Polewali Mandar. This policy had been improve performance, competence and welfare of government employees. The effort of government to optimize additional income policy for the employees There are several supporting factors in the implementation of this policy, namely Resources (budget), attitude and bureaucratic structure. The inhibiting factors have not been able to be handled properly by the Regional Secretariat Polewali Mandar Regency, including in terms of resources (facilities) and resources (Human Resources)

Keywords: implementation, additional income, performance

PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi ialah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku.

Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam pemerintahan, maka di bidang kepegawaian ada sebagian

kewenangan diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan, kepegawaian daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang meliputi perencanaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, pendidikan dan pelatihan, penggajian, pemberhentian, pensiun, pembinaan, kedudukan, hak, kewajiban, tanggung jawab, larangan, sanksi, dan penghargaan merupakan sub-sistem dari sistem kepegawaian nasional.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, maka diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap birokrasi pemerintah daerah atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai penggerak dan pelaksana kebijakan pemerintah di daerah. Perubahan-perubahan tersebut menyebabkan beban Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat menjadi lebih berat dan dituntut untuk mampu merespon dengan cepat setiap perubahan yang terjadi. Masyarakat semakin kritis dan berani menuntut haknya dalam memperoleh pelayanan prima dari aparatur pemerintah. Saat ini *performance* atau kinerja aparatur pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Oleh karenanya aparatur pemerintah harus berupaya meningkatkan kinerjanya.

Dalam mewujudkan manajemen kinerja yang efektif di lingkungan pemerintahan, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri, dimana besarnya tunjangan kinerja yang diberikan kepada PNS perlu mempertimbangkan faktor 1) tingkat capaian pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, 2) nilai dan kelas jabatan, 3) indeks harga nilai jabatan, 4) faktor penyeimbang, dan 5) indeks tunjangan kinerja daerah provinsi/kabupaten/kota. Intinya adalah pemberian remunerasi kepada PNS berdasarkan kinerja individu yang bersangkutan.

Tambahan penghasilan pegawai adalah tambahan yang diberikan kepada PNS dan CPNS yang dikaitkan dengan penilaian kehadiran dan kinerja. Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Pemberian tunjangan kinerja daerah melaksanakan reformasi birokrasi dalam Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman dan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi oleh negara, telah terjadi pula perkembangan penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan upaya-upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, karena itu perlu ada rangka pemerintahan yang kuat.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar menetapkan suatu kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatan disiplin, kinerja dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil yaitu memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Kebijakan tambahan penghasilan ini ditetapkan dalam Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di dalam Peraturan Bupati tersebut disebutkan tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan disiplin, kinerja, memotivasi PNS dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, dan meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Penyusunan laporan HKP yang seharusnya dapat memotivasi seluruh pegawai untuk mendapatkan tambahan penghasilan masih belum berjalan dengan efektif. Masih banyaknya pegawai yang tidak menyampaikan laporan HKP nya kepada Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda sebagai pelaksana teknis. Hal ini disebabkan banyaknya pegawai yang tidak menyusun laporan HKP dengan berbagai alasan. Hal ini dapat dilihat melalui data daftar PNS yang menyampaikan laporan HKP. Sehubungan dengan persoalan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana mekanisme pemberian penghasilan pada Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Polewali Mandar serta untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi pada situasi sekarang. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui gambaran serta menganalisis Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar dengan menempuh langkah-langkah: pengumpulan data, klasifikasi, pengolahan/analisis data dan membuat kesimpulan serta laporan. Metode kualitatif merupakan proses berpikir yang dimulai dari data-data yang terkumpul kemudian diambil secara umum. Metode kualitatif ini digunakan dengan beberapa pertimbangan, pertama metode kualitatif ini lebih mudah menyesuaikan apabila berhadapan langsung dengan kenyataan, kedua menyajikan langsung hubungan antara peneliti dengan responden dan lebih peka, serta dapat menyesuaikan dengan banyak penajaman pengaruh bersama dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

Narasumber penelitian dalam penelitian ini sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) Kabag Ortala, 1 (satu) orang Kasubag Kerjasama Pertanahan dan Kesbangpol dan 1 (satu) orang Verifikator 1 (satu) orang. Selanjutnya hasil wawancara yang diperoleh dari subjek penelitian akan dilakukan triangulasi (*cross check*) kepada 4 (empat) orang informan triangulasi yakni Kasubag Humas dan Komunikasi 1 (satu) orang, Staf Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 1 (satu) orang, Staf Bagian Hukum 1 (satu) orang dan Staf Bagian Administrasi Kesra 1 (satu) orang. Keseluruhan informan dalam penelitian ini sebanyak 7 (tujuh) orang.

Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah (1) Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Polewali Mandar (2) Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (3) Data Rekapitulasi Verifikasi Hasil Kerja Pegawai.

Juli 2018 dan masyarakat Pulau Sembilan yang telah berdiam minimal selama lima tahun. Sampel penelitian

untuk wisatawan lokal/nusantara ditetapkan secara accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai sumber data, maka dapat digunakan sebagai sampel. Setiap wisatawan yang dijumpai di lokasi penelitian langsung diambil sebagai responden. Sementara untuk sampel masyarakat lokal ditetapkan sebanyak 42 orang, dengan rincian tokoh masyarakat sebanyak 12 orang dimana ada perwakilan masing-masing desa, mahasiswa 2 orang, pegawai pemerintah 2 orang, pegawai swasta 2 orang, dan masyarakat umum lainnya sebanyak 24 orang yang terdiri dari pedagang, nelayan, dan pengusaha dan Pegawai Negeri Sipil.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: Teknik kuesioner adalah bentuk pertanyaan terstruktur yang diberikan kepada responden sesuai dengan masalah penelitian. Teknik Pengamatan atau observasi meliputi berbagai hal yang menyangkut pengamatan kondisi fisik dan aktivitas pada lokasi penelitian. Teknik dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan dan pengkajian beberapa informasi dari terbitan berkala, buku-buku, literatur dokumen, foto-foto, surat kabar, media elektronik, dan referensi statistik

Jenis data Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan studi deskriptif dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survey lapangan menyangkut obyek yang akan diteliti dan disesuaikan dengan kebutuhan, dalam hal ini pencatatan dan pengamatan langsung mengenai kondisi obyek wisata pada Pulau Sembilan. Data juga diperoleh dari wawancara terhadap responden berupa wisatawan dan masyarakat lokal pada lokasi penelitian.

Data sekunder diperoleh dari beberapa instansi yang terkait dengan penelitian ini. Data-data tersebut berupa : Data kebijakan pemerintah yang menyangkut pariwisata; fasilitas infrastruktur pariwisata yang ada di lokasi penelitian; data kunjungan wisatawan; keadaan geografis dan demografis; data sosial budaya dan ekonomi, dll.

Sumber data Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dari : Kantor Bappeda, dan Dinas Tata Ruang untuk memperoleh data mengenai kebijaksanaan yang ada di lokasi penelitian; Kantor Dinas Pariwisata untuk memperoleh data kunjungan wisatawan, fasilitas, dan kebijakan sektor pariwisata di lokasi penelitian; kantor statistik, dan Kantor pemerintahan kecamatan untuk memperoleh data geografis dan demografis; survey lapangan teknik analisis data menggunakan SWOT yang sebagian besar dijangkau melalui kuesioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam rangka meningkatkan disiplin, kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Polewali Mandar di apresiasi dalam bentuk Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Hal tersebut merupakan bukti nyata keseriusan Pemerintah

Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dan meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil wawancara mendalam, semua subjek penelitian menyatakan bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai dalam hal ini Hasil Kerja Pegawai adalah penghasilan yang berada diluar gaji pokok pegawai yang diberikan berdasarkan laporan kerja pegawai. Kebijakan ini memberikan semangat kepada Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai tugas pokok dan tugas tambahan yang telah diberikan. Selain itu, dengan adanya kebijakan ini membantu Pegawai Negeri Sipil memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam penelitian ini yang ingin dilihat dari peneliti adalah proses penyampaian informasi dari pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran kebijakan tentang pelaksanaan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah. Sedangkan untuk proses penyampaian informasi dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan sudah cukup jelas tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam, seluruh subjek penelitian menyatakan informasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai cukup bagus, dimana sosialisasi terkait kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh OPD Lingkup Kabupaten Polewali Mandar. Pada teknis pelaksanaan kebijakan ini memperlihatkan transmisi yang baik sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh informan bahwa Bagian Ortom setiap bulannya mengirim surat ke setiap bagian pada Sekretariat Daerah perihal pemberitahuan besaran 1 bobot poin dalam rupiah dan batas waktu pengumpulan Hasil Kerja Pegawai.

Hasil penelitian yang disampaikan oleh subjek penelitian yang mengatakan bahwa sumber daya berupa anggaran yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar cukup memenuhi kebutuhan PNS sehingga maksud dari Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai mulai terwujud. Di lain hal sumber daya berupa fasilitas untuk melaporkan Hasil Kerja Pegawai tidak memadai dengan sulitnya PNS menginput HKP secara *online* di sebabkan kapasitas server yang kurang mendukung PNS mengakses aplikasi SIMKP secara bersamaan dalam satu waktu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber daya (anggaran) pada Sekretariat Daerah mendukung keberhasilan implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai. Sedangkan terkait sumber daya (fasilitas) belum dapat sepenuhnya mendukung kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini secara umum sudah dapat menjawab dari tujuan penelitian, kerangka teori maupun kerangka konsep. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah Polewali Mandar secara umum sudah sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 20116 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini telah meningkatkan kompetensi dan kinerja PNS serta meningkatkan kesejahteraan PNS. Hal ini terlihat dari keseluruhan target sasaran yang ada dapat dicapai dengan baik, dengan rata-rata persentase pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan 95%,

Faktor pendukung implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai pada Sekretariat Daerah yaitu sumber daya (anggaran), sikap dan struktur birokrasi. Sedangkan yang menjadi faktor kendala adalah sumber daya (fasilitas)

DAFTAR PUSTAKA

- Bryson, M John, 2000. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial Pustaka Pelajar*, Yogyakarta..
- Burhan, N 1994 *Perencanaan Strategik*, Pustaka Bina-man Pressindo, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Destinasi Banda Neira Brand Pariwisata Indonesia Timur*. Edisi Pertama. Kaki Langit Kencana: Jakarta.
- Fiatiano, Edwin. *Tata Cara Mengemas Produk Pari-wisata pada Daerah Tujuan Wisata*, (Online), (<http://journal.unair.ac.id/.../Tata%20Cara%20Mengemas%20Produk%20Pariwisata.pdf>), diakses 4 juni 2018.
- Ilyas, Muhammad. 2009. *Strategi Pengembangan Pariwisata Kepulauan Togean di Kabupaten Tojo Una-Una*. Tesis. Makassar: Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Jamaluddin A, Mursyid. 2016. *Tradisi Mappatabe' dalam Masyarakat Bugis Kecamatan Pulau Sinjai kabupaten Sinjai*.
- Kabupaten Sinjai Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat Statistik Kabupaten Sinjai 2017.
- Kecamatan Pulau Sembilan Dalam Angka Tahun 2016. Badan Pusat \Statistik Kabupaten Sinjai 2017
- Laporan Akhir RIPPDA Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Dinas Pariwisata Kabupaten Sinjai
- La Ode Unga, Kartini. 2017. *Strategi Pengembangan Kawasan Wisata Kepulauan Banda Tesis Makassar Program Studi Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Novel Feris. 2012. *Strategi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Solok Propinsi Sumatra Barat*. Tesis. Yogyakarta Program Studi Administrasi Publik. Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada
- Program Pascasarjana Universitas Bosowa. 2017. *Pedoman Penulisan Tesis dan Artikel Ilmiah*
- Pitana, Gde, dan Diarta, I Ketut Surya. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. CV Andi Offset: Yogyakarta.
- Rangkut, Freddy, (2001), *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- RENSTRA (Rencana Strategis Daerah Kabupaten Sinjai) Tahun 2013-2018.
- Rahim R. Nilai –Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Ujung Pandang: Hasanuddi Press.
- Spillane, James J 1994 *Pariwisata Indonesia Siasat Ekonomi dan Kebudayaan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suwantoro, Gamal 2001, *Dasar-Dasar Pariwisata*, Andi Yogyakarta